

## PENGANTAR REDAKSI

Indonesia memasuki masa demokrasi setelah terlepas dari rejim otoriter sebelumnya. Periode transisi demokrasi merupakan periode yang paling rumit dan sulit. Jika tidak berhati-hati, sewaktu-waktu dapat kembali ke arah otoritarianisme .

Pemilihan Umum tahun 1999 belum mampu memaknai demokrasi secara substansial tetapi baru bermakna pada tatanan prosedural. Hal tersebut tercermin pada fungsi lembaga Perwakilan Rakyat (DPR dan DPRD) yang lebih sebagai alat memperjuangkan kepentingan pribadi ataupun golongan daripada sebagai penyalur aspirasi dalam rangka terciptanya kesejahteraan rakyat.

Pemilihan Umum April 2004 masyarakat mengalami perubahan perilaku politik : pendidikan politik mulai berkembang, lebih rasional menentukan pilihan, tidak memilih partai politik berkinerja buruk dan tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat. Perubahan perilaku ini di masa depan akan mendorong partai-partai politik di Indonesia memperbaiki kinerjanya.

Pemilihan Presiden secara langsung bulan September 2004 telah berlangsung dengan sukses, aman dan lancar. Kedewasaan politik masyarakat Indonesia ini perlu didukung Presiden terpilih untuk menjalankan demokrasi dengan lebih baik melalui penataan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka *Good Governance*.

Otonomi daerah akan memudahkan pemerintah merespon tuntutan-tuntutan masyarakat, memperlancar dan meningkatkan kualitas tugas melayani masyarakat. *Good Governance* akan membantu pemerintah dalam berkonsentrasi pada demokratisasi dan mekanisme politik dan administrasi secara efektif dan efisien.

Dialogue, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik kali ini menyajikan perkembangan demokrasi di Indonesia, kaitannya dengan reformasi administrasi dan kebijakan publik, terutama pada penyelenggaraan otonomi daerah dan pelayanan publik.

Semoga bermanfaat bagi penyempurnaan Demokrasi Indonesia.

SALAM DARI REDAKSI